Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Perbandingan Model *Welfare State* Skandinavia dan Model *Productive Welfare* Asia Timur: Sebuah Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Kesejahteraan

Rachel Kezia Margareth Tambunan[1], I Ketut Putra Erawan[2], Tedi Erviantono[3]
[123] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:
Received November, 2025
Revised November, 2025
Accepted December, 2025
Available December, 2025

racheltambunan21@gmail.com,
ketut.erawan@ipd.or.id,
erviantono2@unud.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Tulisan ini membandingkan model *Welfare State* Skandinavia dan model *Productive Welfare* Asia Timur melalui tinjauan literatur ekonomi politik kesejahteraan. Analisis menunjukkan bahwa kedua model berangkat dari fondasi filosofis yang berbeda: solidaritas universal dan egalitarianisme di Skandinavia, berlawanan dengan instrumentalisme pembangunan dan nilai-nilai Konfusianisme di Asia Timur. Perbedaan prinsip ini menghasilkan variasi tajam dalam struktur pendanaan, basis hak kesejahteraan, serta konfigurasi penyediaan layanan. Studi ini juga menyoroti perkembangan kontemporer seperti reformasi *Moon Care* di Korea Selatan dan perbandingan mekanisme pensiun NDC Swedia dengan CPF Singapura. Temuan ini menegaskan bahwa kedua wilayah menghadirkan jalur unik dalam pembangunan kesejahteraan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh tipologi Barat tradisional.

Kata Kunci*: welfare state*; *produktivisme*; *konfusianisme*; *Pembangunan*; *kesejahteraan sosial*

A B S T R A C T

This paper compares the Scandinavian Welfare State model with the East Asian Productive Welfare model through a review of political economy literature. The analysis reveals that the two models originate from contrasting philosophical foundations: universal solidarity and egalitarianism in Scandinavia versus developmental instrumentalism and Confucian values in East Asia. These differences shape distinct funding structures, entitlement logics, and service delivery configurations. The study also examines contemporary shifts, including Korea's Moon Care reforms and the institutional comparison between Sweden's NDC pension and Singapore's CPF system. Findings suggest that both regions follow unique welfare trajectories that cannot be fully captured by traditional Western typologies.

Keywords: welfare state*; *productive welfare*; *confucianism*; *development*; *social policy

1. PENDAHULUAN

Dalam diskursus ekonomi politik global, perdebatan mengenai peran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya telah lama menjadi pusat perhatian, terutama sejak meluasnya industrialisasi dan globalisasi pasca Perang Dunia II. Salah satu kontribusi intelektual paling berpengaruh dalam memahami keragaman sistem kesejahteraan ialah tipologi rezim kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Esping-Andersen (1990), yang menempatkan negara-negara Skandinavia—Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia—ke dalam kategori rezim Sosial Demokratik. Model ini dianggap sebagai bentuk *welfare state* paling maju, berorientasi pada prinsip universalitas, *decommodification*, serta redistribusi sumber daya untuk mendorong kesetaraan ekonomi dan sosial. Dalam praktiknya, negara-negara Nordik mampu memadukan

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pertumbuhan ekonomi kapitalis dengan perlindungan sosial dari lahir hingga meninggal yang mencakup layanan kesehatan komprehensif, pendidikan gratis, asuransi pengangguran, pensiun publik, dan kebijakan keluarga yang ekstensif (Nordics, 2020). Kombinasi antara pajak progresif, birokrasi publik yang efisien, dan legitimasi politik yang kuat telah menjadikan model ini rujukan global dalam pembangunan kesejahteraan.

Namun, sejak paruh akhir abad ke-20, muncul fenomena baru yang menantang asumsi bahwa kesejahteraan sosial yang tinggi hanya dapat dicapai melalui intervensi negara yang besar. Pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang luar biasa—dimulai oleh Jepang pascaperang dan dilanjutkan oleh Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong—menunjukkan bahwa negara dapat mencapai kemajuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tanpa perlu meniru model *welfare state* Barat. Negara-negara ini menampilkan tingkat pengangguran rendah, investasi besar dalam pendidikan dan infrastruktur, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan global, tetapi dengan pengeluaran publik untuk kesejahteraan yang relatif kecil. Paradoks inilah yang memunculkan pertanyaan fundamental: apakah Asia Timur sekadar varian dari rezim liberal yang minim intervensi, ataukah kawasan ini telah membangun rezim *productive welfare* yang sepenuhnya berbeda?

Konsep *productive welfare*, yang banyak dibahas oleh Kwon (2005) dan Holliday (2000), menekankan peran kesejahteraan sebagai instrumen pembangunan ekonomi, bukan semata hak sosial. Dalam model ini, negara tetap berperan besar, tetapi fokusnya bukan pada redistribusi melainkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan keluarga. Korea Selatan dan Singapura menjadi contoh utama bagaimana kebijakan kesejahteraan dirancang untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, sementara negara Nordik memaknai kesejahteraan sebagai hak universal yang tidak bersyarat, negara Asia Timur cenderung menempatkannya sebagai alat untuk mencapai tujuan kolektif yang lebih besar, seperti industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perdebatan antara kedua model tersebut lebih dari sekadar klasifikasi akademis; ia menyentuh akar dari filosofi pemerintahan dan nilai masyarakat. Apakah negara harus melindungi warganya dari risiko pasar tanpa syarat, ataukah negara seharusnya merancang sistem perlindungan sosial yang memotivasi produktivitas individu? Literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa perbedaan nilai budaya, sejarah pembangunan negara, struktur keluarga, dan dinamika politik berperan penting dalam membentuk kedua model tersebut. Misalnya, homogenitas sosial dan solidaritas kelas pekerja yang kuat di Skandinavia memberi landasan bagi pajak tinggi dan redistribusi luas. Sebaliknya, tradisi Konfusianisme di Asia Timur menekankan kerja keras, disiplin, dan kewajiban keluarga, yang kemudian memengaruhi bentuk kebijakan sosial yang lebih bersifat selektif dan fokus pada investasi manusia.

Tulisan ini tidak hanya membandingkan kedua model secara filosofis, tetapi juga menelaah dinamika kontemporer yang sering diabaikan. Salah satu perkembangan signifikan adalah reformasi kesehatan di Korea Selatan yang dikenal sebagai *Moon Care*. Kebijakan ini, yang digagas pada 2017, memperluas cakupan asuransi kesehatan nasional, menurunkan beban biaya pasien, dan menandai pergeseran paradigma dari model produktivis murni menuju pendekatan yang lebih universalistik, meskipun masih berada dalam kerangka efisiensi fiskal (Korean Culture and Information Service, 2021). Reformasi ini menunjukkan bahwa batas antara kedua model dapat mencair ketika tekanan politik dan tuntutan masyarakat meningkat.

Selain itu, perbandingan teknis antara sistem pensiun *Notional Defined Contribution* (NDC) Swedia dan *Central Provident Fund* (CPF) Singapura memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana kedua kawasan membangun instrumen kesejahteraan yang berbeda. Sistem NDC Swedia, yang berbasis kontribusi notional dan penyesuaian otomatis sesuai kondisi demografis serta ekonomi, dirancang untuk memastikan keberlanjutan fiskal tanpa menghilangkan prinsip

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



solidaritas sosial. Di sisi lain, CPF Singapura merupakan skema tabungan wajib yang sangat bergantung pada akumulasi individu, mencerminkan filosofi produktivisme dan tanggung jawab pribadi yang menjadi ciri khas Asia Timur (European Commission, 2021). Perbandingan ini menyoroti bagaimana desain institusional mencerminkan orientasi ideologis yang lebih luas.

Tidak hanya sampai di situ, dampak pandemi COVID-19 dan tekanan demografis ekstrem—seperti populasi menua dan tingkat fertilitas sangat rendah—juga memaksa kedua model untuk beradaptasi. Negara Nordik meningkatkan belanja sosial dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan, sementara Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan Singapura, memperluas program bantuan tunai dan perlindungan tenaga kerja yang sebelumnya lebih terbatas. Transformasi ini membuka kesempatan untuk menilai efektivitas jangka panjang dari kedua rezim dalam menghadapi krisis yang tidak terduga (Chou dkk., 2024).

Dengan demikian, literatur kontemporer menunjukkan bahwa meskipun model *welfare state* Skandinavia dan *productive welfare* Asia Timur berangkat dari basis filosofis dan institusional yang berbeda, keduanya kini menghadapi tantangan serupa terkait ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan dinamika demografi. Studi perbandingan ini tidak hanya bertujuan memahami perbedaan konseptual antara keduanya, tetapi juga menelaah bagaimana keduanya beradaptasi dan berpotensi saling memengaruhi dalam pembangunan kesejahteraan global di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hegemoni Tipologi Barat: Esping-Andersen dan Konsep Dekomodifikasi

Titik tolak bagi hampir seluruh analisis mengenai negara kesejahteraan modern adalah karya monumental Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990). Dalam karya tersebut, Esping-Andersen menyusun klasifikasi tiga rezim kesejahteraan yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam literatur kebijakan sosial. Tipologi ini berlandaskan tiga prinsip analitis: (1) tingkat dekomodifikasi, yaitu sejauh mana layanan kesejahteraan dibebaskan dari mekanisme pasar; (2) sifat stratifikasi sosial, yakni apakah kebijakan sosial memperkuat atau justru mengurangi hierarki kelas; serta (3) hubungan antara negara, pasar, dan keluarga dalam menyediakan kesejahteraan (Zhou & Ronald, 2016). Berdasarkan tiga prinsip ini, Esping-Andersen mengidentifikasi tiga rezim utama.

Pertama, rezim Liberal yang banyak ditemukan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Sistem ini berorientasi pada bantuan yang diuji kemampuannya (*means-tested*), jaring pengaman sosial minimal, serta penekanan pada mekanisme pasar sebagai penyedia kesejahteraan utama. Kedua, rezim Konservatif-Korporatis yang lazim di Eropa Kontinental seperti Jerman, Prancis, dan Austria. Rezim ini mempertahankan struktur status sosial melalui sistem asuransi sosial berbasis pekerjaan dan menempatkan keluarga sebagai unit kesejahteraan penting, sejalan dengan nilai-nilai tradisional Katolik atau konservatif. Ketiga, rezim Sosial Demokratik yang berkembang di negara-negara Skandinavia, yang menonjolkan prinsip universalisme, tingkat dekomodifikasi tinggi, serta komitmen kuat terhadap kesetaraan status sosial.

Dalam kerangka ini, negara-negara Skandinavia ditempatkan sebagai model yang paling progresif dan ideal. Dekomodifikasi dijadikan ukuran utama kualitas negara kesejahteraan karena mengukur sejauh mana individu dapat mempertahankan standar hidup yang layak tanpa bergantung sepenuhnya pada pendapatan pasar. Dengan tingkat dekomodifikasi yang tinggi, warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan pendapatan sebagai hak kewarganegaraan. Dengan kata lain, negara bertindak sebagai penjamin kesejahteraan sehingga risiko sosial seperti sakit, pengangguran, atau usia lanjut tidak

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



mengancam kelangsungan hidup seseorang (Stroup, 2022). Hal ini menjadikan model Sosial Demokratik sering dipandang sebagai bentuk paling matang dari negara kesejahteraan modern.

Namun, dominasi tipologi Esping-Andersen dalam literatur kebijakan sosial telah memicu kritik luas, terutama ketika kerangka ini diterapkan di luar konteks Barat. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa tipologi tersebut terlalu berakar pada pengalaman negara-negara Eropa dan tidak mampu menangkap dinamika kesejahteraan di kawasan lain. Salah satu kelemahan mendasar adalah anggapan bahwa negara, pasar, dan keluarga merupakan tiga aktor universal yang perannya dapat digeneralisasikan. Dalam kenyataannya, di banyak wilayah—khususnya Asia Timur dan Eropa Selatan—keluarga memainkan peran jauh lebih sentral dalam penyediaan kesejahteraan sehingga hubungan antara negara dan keluarga tidak dapat dianalisis melalui kacamata yang sama seperti di Eropa Utara (Zhou & Ronald, 2016). Misalnya, sistem *productive welfare* di Asia Timur sangat menekankan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan, perawatan lansia, dan bahkan jaring pengaman ekonomi dasar. Peran ini tidak sepenuhnya tertangkap dalam kerangka Esping-Andersen yang lebih menonjolkan relasi negara–pasar.

Selain itu, tipologi Esping-Andersen juga dikritik karena terlalu fokus pada transfer pendapatan dan perlindungan sosial berbasis tunai, sementara banyak negara di Asia, Amerika Latin, maupun kawasan berkembang lainnya memberikan kesejahteraan terutama melalui penyediaan layanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan publik. Di Singapura, misalnya, kepemilikan rumah publik merupakan instrumen kesejahteraan utama, sementara di Korea Selatan dan Taiwan, investasi pada pendidikan dan produktivitas tenaga kerja lebih menentukan ketahanan sosial daripada transfer uang tunai. Oleh karena itu, dimensi penyediaan layanan publik ini sering tidak tercakup dalam pengukuran dekomodifikasi yang berfokus pada perlindungan pendapatan.

Dengan demikian, meskipun tipologi Esping-Andersen tetap menjadi kerangka analitis yang sangat berpengaruh, dominasi perspektif Barat dalam literatur kesejahteraan menimbulkan tantangan epistemologis ketika diaplikasikan pada konteks non-Barat. Kritik terhadap keterbatasan tipologi ini membuka ruang bagi konseptualisasi baru yang lebih sensitif terhadap variasi kultural, struktural, dan institusional dalam pembangunan kesejahteraan global.

Tantangan dari Timur: Konsep *Productivist Welfare Capitalism*

Ian Holliday (2000) mengajukan salah satu kritik paling berpengaruh terhadap penerapan tipologi Esping-Andersen di Asia Timur dengan memperkenalkan konsep *Productivist Welfare Capitalism* (PWC). Menurutnya, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura tidak dapat secara memadai diklasifikasikan ke dalam tiga dunia kesejahteraan yang dirumuskan oleh Esping-Andersen. Sebaliknya, negara-negara tersebut membentuk dunia keempat dengan logika kesejahteraan yang berbeda secara fundamental (Holliday, 2000). Ide Holliday ini memberikan perspektif baru dalam melihat hubungan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi di kawasan yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi Asia Timur.

Karakteristik utama PWC terletak pada subordinasi kebijakan sosial terhadap tujuan pembangunan ekonomi. Tidak seperti rezim Sosial Demokratik di Skandinavia yang memandang kesejahteraan sebagai hak sosial universal, negara-negara Asia Timur lebih melihat kebijakan sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produktif tenaga kerja dan mendukung strategi industrialisasi. Dengan kata lain, kebijakan sosial tidak dirancang untuk mencapai redistribusi egaliter, tetapi untuk mengefisienkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pertama, dalam kerangka PWC, kebijakan sosial tidak dipandang sebagai hak melekat warga negara. Negara hanya mengintervensi ketika dianggap perlu untuk mendukung stabilitas sosial dan produktivitas ekonomi. Kedua, kebijakan sosial diposisikan sebagai instrumen yang secara langsung menunjang pertumbuhan ekonomi. Intervensi negara diarahkan pada sektor-sektor yang diyakini menghasilkan dampak ekonomi jangka panjang, seperti pendidikan, pelatihan tenaga

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kerja, kesehatan dasar, dan pembangunan keluarga yang kuat. Ketiga, negara meminimalkan kebijakan yang bersifat konsumtif atau protektif—misalnya tunjangan pengangguran, bantuan sosial jangka panjang, dan perlindungan pendapatan universal—karena dianggap dapat melemahkan insentif kerja dan membebani anggaran publik (Holliday, 2000).

Penjelasan Holliday memperoleh dukungan luas dari berbagai literatur kebijakan sosial Asia Timur. Aspalter (2006) menegaskan bahwa orientasi kebijakan sosial di kawasan tersebut pada dasarnya bersifat instrumental, yaitu bertujuan mendukung pembangunan ekonomi, bukan menciptakan tatanan sosial yang egaliter. Wilding (2008) turut menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pilar legitimasi utama bagi negara-negara Asia Timur, terutama selama periode rezim otoriter perkembangan seperti di Korea Selatan dan Taiwan pada dekade 1970–1980-an. Dalam konteks tersebut, pemerintah memperoleh legitimasi bukan dari kemampuan melakukan redistribusi sosial, tetapi dari keberhasilan mencapai industrialisasi cepat, ekspor kompetitif, dan peningkatan standar hidup.

Pandangan ini juga sejalan dengan analisis Choi (2007), yang menyatakan bahwa pengeluaran sosial di Asia Timur hanya dapat diterima sejauh memiliki justifikasi ekonomi yang jelas. Kebijakan yang tidak mendukung produktivitas—seperti program perlindungan pengangguran komprehensif atau bantuan sosial universal—sering dipandang sebagai beban fiskal yang berisiko mengganggu agenda pembangunan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara Asia Timur mengembangkan sistem kesejahteraan yang sangat selektif, berbiaya rendah, dan berorientasi pada pasar tenaga kerja. Contohnya dapat dilihat pada skema pensiun berbasis tabungan wajib seperti *Central Provident Fund* (CPF) di Singapura atau investasi besar-besaran Korea Selatan dalam pendidikan dan teknologi sejak akhir abad ke-20.

Model PWC juga mencerminkan peran sentral keluarga dalam penyediaan kesejahteraan, suatu karakteristik yang sangat berbeda dari model Nordik. Dengan adanya nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan tanggung jawab keluarga, negara dapat mempertahankan pengeluaran sosial yang rendah karena banyak fungsi kesejahteraan—termasuk perawatan lansia, dukungan anak, dan jaring pengaman informal—ditanggung oleh keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa PWC bukan hanya fenomena kebijakan, tetapi juga hasil interaksi antara budaya, struktur ekonomi, dan strategi politik.

Dengan demikian, konsep *Productivist Welfare Capitalism* memberikan lensa analitis penting untuk memahami mengapa negara-negara Asia Timur mampu mencapai pembangunan ekonomi yang pesat tanpa mengadopsi model *welfare state* Barat. Keberadaan logika produktivisme ini menantang hegemoni tipologi Barat dalam studi kesejahteraan dan membuka ruang bagi pengembangan teori-teori baru yang lebih sensitif terhadap konteks non-Barat.

Konsep *Developmental Welfare State*

Konsep *Productivist Welfare Capitalism* (PWC) yang dikemukakan oleh Holliday (2000) menjadi pijakan awal dalam memahami kekhasan kebijakan sosial Asia Timur. Namun, sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa pendekatan Holliday terlalu menekankan sifat anti-welfare rezim Asia Timur. Untuk melengkapi perspektif tersebut, Huck-ju Kwon (2005, 2007) mengembangkan kerangka *Developmental Welfare State* (DWS), suatu konsep yang menempatkan kesejahteraan bukan sebagai subordinat ekonomi semata, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Menurut Kwon, negara-negara Asia Timur—seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura—tidak anti terhadap redistribusi, tetapi mengembangkan model kesejahteraan yang dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi, modernisasi industri, dan stabilitas sosial (Kwon, 2007).

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kwon berargumen bahwa model Asia Timur harus dipahami melalui logika negara pembangunan (*developmental state*), yaitu negara yang secara aktif memandu industrialisasi melalui kebijakan industri selektif, koordinasi antara negara dan bisnis, serta disiplin sosial. Dalam kerangka ini, kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari strategi ekonomi karena keduanya bergerak secara simultan untuk memperkuat kapasitas nasional. Sebagai contoh, investasi besar dalam pendidikan dan kesehatan bukan sekadar demi kesejahteraan sosial, melainkan merupakan fondasi bagi pembentukan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Dengan demikian, negara Asia Timur melihat kesejahteraan sebagai investasi jangka panjang, bukan beban fiskal.

Lebih jauh, Kwon membagi evolusi DWS ke dalam dua tahap historis yang menunjukkan perubahan orientasi negara seiring transformasi politik dan ekonomi. Tahap pertama adalah *Selective Developmental Welfare State*, yang berlangsung selama masa awal industrialisasi, umumnya sebelum 1990-an. Pada periode ini, negara memberikan kesejahteraan secara selektif kepada kelompok yang dianggap strategis bagi stabilitas rezim dan keberhasilan industrialisasi. Kelompok tersebut meliputi tentara, pegawai negeri, dan pekerja industri besar yang bekerja di sektor-sektor kunci seperti manufaktur dan elektronik. Mereka menerima perlindungan sosial relatif lebih baik seperti pensiun berkontribusi, perawatan kesehatan, dan subsidi pendidikan. Namun, petani, pekerja sektor informal, serta pekerja usaha kecil sering kali terpinggirkan dan tidak memperoleh akses perlindungan sosial setara (Wong, 2025). Selektivitas ini mencerminkan prioritas negara untuk mempertahankan stabilitas politik dan mendukung industri yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Tahap kedua adalah *Inclusive Developmental Welfare State*, yang muncul setelah krisis finansial Asia 1997 dan gelombang demokratisasi di Korea Selatan, Taiwan, dan sebagian negara kawasan. Krisis 1997 memperlihatkan kerentanan sistem sosial-ekonomi dan mendorong tekanan publik untuk memperluas perlindungan sosial. Pada tahap ini, negara mulai bergerak menuju universalisme dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan, pensiun, dan bantuan sosial untuk populasi yang lebih luas. Namun, berbeda dari model universalisme Skandinavia, perluasan ini tetap dibingkai dalam logika produktivitas: kesejahteraan dipandang efektif jika mendorong partisipasi ekonomi, mengurangi risiko pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kwon, 2007). Dengan demikian, inklusivitas DWS tetap mempertahankan karakter produktivis, meskipun lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial.

Kerangka DWS juga menyoroti peran institusi dan konteks politik dalam mendorong perubahan. Demokratisasi di Korea Selatan, misalnya, memperkuat tuntutan serikat pekerja dan masyarakat sipil untuk memperluas hak sosial, sehingga memaksa negara melakukan reformasi jaminan kesehatan dan pensiun secara drastis. Di Taiwan, kompetisi elektoral pascareformasi politik turut mendorong partai-partai untuk menawarkan program kesejahteraan yang lebih luas. Sementara itu, Singapura menggabungkan elemen DWS dengan kebijakan perumahan publik dan tabungan wajib yang sangat terinstitusionalisasi untuk menciptakan stabilitas sosial dan mempromosikan etos kemandirian.

Melalui pemahaman DWS, literatur menunjukkan bahwa kebijakan sosial Asia Timur tidak dapat dipahami hanya sebagai minimal atau lemah. Justru, negara-negara tersebut mengembangkan model kesejahteraan yang fungsional, strategis, dan kompatibel dengan agenda pembangunan ekonomi. Kerangka ini memperkaya studi kebijakan sosial global dengan menunjukkan bahwa terdapat pola hibrida antara negara pembangunan dan negara kesejahteraan, di mana kesejahteraan menjadi instrumen pembangunan sekaligus sarana menciptakan kohesi sosial.

2. METODE

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Penelitian ini tidak mengambil data primer dari lapangan (seperti survei atau wawancara langsung), melainkan mengandalkan data sekunder dari berbagai literatur akademik yang otoritatif. Fokus utamanya adalah mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan yang relevan dengan ekonomi politik kesejahteraan. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang berfokus pada dua klaster utama:

1) Literatur Teoretis: Mengkaji teori-teori klasik dan kontemporer, seperti tipologi "Three Worlds of Welfare Capitalism" dari Gøsta Esping-Andersen dan teori kritik "Productivist Welfare Capitalism" dari Ian Holliday, serta konsep "Developmental Welfare State" dari Huck-ju Kwon.
2) Literatur Empiris & Kebijakan: Mengumpulkan data spesifik mengenai kebijakan negara (seperti sistem pensiun CPF di Singapura vs NDC di Swedia, atau reformasi kesehatan "Moon Care" di Korea Selatan).

Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis utama:

1) Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*): Membandingkan dua objek penelitian (Model Skandinavia dan Model Asia Timur) untuk mencari persamaan dan perbedaan fundamental dalam hal filosofi, institusi, dan dampak kebijakan. Contohnya adalah perbandingan langsung antara sistem pendanaan berbasis pajak di Norwegia dengan asuransi sosial di Korea Selatan.
2) Analisis Kritis (*Critical Analysis*): Tidak hanya mendeskripsikan, penelitian ini juga mengkritik validitas teori lama dalam konteks modern. Misalnya, analisis ini menantang label produktivis yang kaku bagi Asia Timur dengan menyajikan bukti adanya pergeseran menuju inklusivitas sosial akibat demokratisasi dan penuaan penduduk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Akar Filosofis: Solidaritas vs. Instrumentalisme

Perbedaan mendasar antara model kesejahteraan Skandinavia dan Asia Timur tidak semata terletak pada aspek teknis, institusional, atau besaran anggaran, tetapi berakar pada fondasi filosofis yang membentuk cara masing-masing kawasan memahami hubungan antara individu, negara, dan masyarakat. Model Skandinavia dibangun di atas prinsip solidaritas sosial dan egalitarianisme, yang menempatkan kesejahteraan sebagai hak universal yang melekat pada status kewarganegaraan. Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang bertanggung jawab kolektif untuk memastikan tidak ada individu yang terpinggirkan oleh risiko pasar atau ketidakberuntungan sosial. Prinsip solidaritas ini terefleksi dalam sistem perpajakan progresif, redistribusi yang luas, dan layanan sosial universal yang tidak membedakan berdasarkan status pekerjaan atau kemampuan bayar.

Sebaliknya, model Asia Timur berakar pada instrumentalisme kesejahteraan, yaitu pandangan bahwa kebijakan sosial harus berfungsi mendukung tujuan pembangunan nasional, meningkatkan produktivitas, dan menjaga stabilitas sosial. Dipengaruhi nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan kerja keras, hierarki sosial, dan peran keluarga, negara Asia Timur memandang kesejahteraan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan bukan sebagai hak yang dapat diklaim secara universal. Akibatnya, perlindungan sosial sering bersifat selektif, berorientasi pada tenaga kerja produktif, dan bergantung pada kontribusi keluarga sebagai pilar

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



utama kesejahteraan. Perbedaan filosofis inilah yang menjelaskan mengapa kedua model berkembang dengan logika yang sangat berbeda meskipun menghadapi tantangan modern yang serupa.

Skandinavia: *Folkhemmet* dan Solidaritas Olof Palme

Model kesejahteraan Skandinavia dibangun di atas fondasi ideologis yang jauh lebih mendalam daripada sekadar kebijakan fiskal atau desain kelembagaan. Di Swedia, fondasi tersebut dikenal sebagai *Folkhemmet*—secara harfiah berarti "Rumah Rakyat." Gagasan ini dipopulerkan oleh Partai Sosial Demokrat sejak tahun 1930-an dan menjadi filosofi moral utama dalam pembangunan negara kesejahteraan Nordik. *Folkhemmet* membayangkan negara sebagai sebuah rumah yang baik, tempat semua warga negara diperlakukan seperti anggota keluarga yang setara, tanpa adanya "anak tiri" maupun "anak emas." Konsep ini bukan sekadar metafora sentimental, melainkan landasan normatif yang mengarahkan pembangunan sistem universal yang melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian.

Tokoh sentral dalam artikulasi modern *Folkhemmet* adalah Olof Palme, Perdana Menteri Swedia yang terkenal karena komitmennya terhadap solidaritas sosial, demokrasi, dan keadilan global. Palme memandang kebijakan sosial bukan hanya sebagai jaring pengaman bagi mereka yang gagal dalam pasar tenaga kerja, tetapi sebagai instrumen emansipasi manusia—alat untuk memperluas pilihan hidup, mendorong partisipasi sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih setara. Engelstad dkk. (2017) mencatat bahwa Palme menganggap solidaritas sebagai inti moral masyarakat Nordik, sebuah nilai yang harus termanifestasi dalam kebijakan publik, bukan hanya dalam wacana politik.

Pandangan filosofis Palme tergambar jelas dalam pidato terkenalnya pada tahun 1984: "Tujuan masyarakat bukan untuk mewujudkan ide tunggal yang tidak berhubungan dengan kondisi kehidupan manusia... Pekerjaan—memiliki pekerjaan—adalah bagian esensial dari kehidupan manusia... Kita mendukung ekonomi pasar, tetapi kita menentang masyarakat pasar" (Palme, 1984). Pernyataan ini menekankan perbedaan fundamental antara menerima peran mekanisme pasar sebagai alat ekonomi dan menolak dominasi logika pasar atas seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, Palme membela pasar, tetapi menolak "masyarakat pasar" yang menjadikan nilai ekonomi sebagai ukuran tunggal keberhasilan manusia.

Filosofi ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan universalisme, salah satu pilar utama model Sosial Demokratik di Skandinavia. Dalam kerangka universalisme, layanan kesehatan, pendidikan, perawatan anak, dan perlindungan pendapatan diberikan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kelompok miskin atau rentan. Pendekatan ini muncul dari keyakinan bahwa keberlanjutan politik negara kesejahteraan hanya dapat dijamin jika seluruh kelas sosial—terutama kelas menengah—mengandalkan dan merasa puas dengan layanan publik. *Nordic Cooperation* (2021) menyatakan bahwa dengan merancang layanan publik berkualitas tinggi yang melayani semua warga, negara-negara Nordik berhasil membangun dukungan luas terhadap kebijakan perpajakan progresif dan tingkat belanja sosial yang tinggi.

Universalisme juga merupakan strategi untuk mencegah fragmentasi sosial. Dalam sistem selektif—di mana hanya kelompok miskin menerima bantuan—sering muncul stigma, diskriminasi, dan layanan berkualitas rendah yang akhirnya memperburuk ketimpangan. Sebaliknya, Skandinavia menghindari dualisme layanan, yaitu situasi di mana orang kaya memilih layanan privat sementara orang miskin bergantung pada layanan publik berkualitas rendah. Dengan menjadikan layanan publik sebagai standar emas, negara membangun kohesi sosial yang kuat dan memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat.

Selain itu, universalisme menciptakan rasa kepercayaan (trust) yang tinggi terhadap negara dan sesama warga. Tingkat kepercayaan sosial di negara-negara Skandinavia merupakan yang tertinggi di dunia, dan banyak sarjana berpendapat bahwa kepercayaan ini bukan penyebab awal,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



tetapi hasil dari kebijakan universal yang melibatkan semua orang dalam sistem kesejahteraan. Kepercayaan kemudian memfasilitasi penerimaan warga terhadap pajak tinggi dan redistribusi, menciptakan lingkaran kebijakan yang stabil dan menguntungkan.

Dengan demikian, *Folkhemmet* dan filosofi solidaritas ala Olof Palme bukan hanya aspirasi moral, tetapi juga fondasi politik dan institusional yang memungkinkan munculnya negara kesejahteraan paling egaliter di dunia. Model Nordik berhasil bukan semata karena desain teknokratiknya, tetapi karena ia dilandasi pandangan filosofis tentang kesetaraan, kebersamaan, dan peran negara sebagai penjaga kesejahteraan kolektif.

Asia Timur: Konfusianisme dan Logika Pembangunan

Akar filosofis model kesejahteraan Asia Timur sering dipahami melalui dua lensa utama: etika Konfusianisme dan pragmatisme pembangunan yang dipandu oleh negara. Tidak seperti model Skandinavia yang berlandaskan solidaritas universal, model Asia Timur berakar pada nilai-nilai moral, sosial, dan kultural yang sangat berbeda. Konfusianisme, yang selama berabad-abad membentuk norma sosial di Tiongkok, Korea, dan Jepang, menekankan *filial piety* (kesalehan atau bakti anak kepada orang tua), pentingnya pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial, harmoni kolektif di atas individualisme, serta penghormatan terhadap hierarki sosial dan otoritas (Wong, 2025). Nilai-nilai ini kemudian diterjemahkan ke dalam logika kebijakan yang sangat memengaruhi pembentukan sistem kesejahteraan Asia Timur selama abad ke-20.

Dalam kerangka kebijakan, etika Konfusianisme melahirkan prinsip *familialisme*, yaitu keyakinan bahwa keluarga adalah unit fundamental kesejahteraan. Tanggung jawab utama untuk merawat anak, lansia, dan anggota keluarga yang membutuhkan berada pada keluarga, bukan negara. Negara hanya akan mengambil alih bila struktur keluarga gagal total. Dengan demikian, kebutuhan untuk membangun sistem negara kesejahteraan yang luas dianggap tidak mendesak. Choi (2007) menjelaskan bahwa inilah yang menjadi legitimasi kultural bagi rendahnya pengeluaran sosial pemerintah selama periode keajaiban ekonomi Asia Timur. Orang tua mengandalkan anak mereka untuk dukungan finansial di hari tua, sementara pendidikan dianggap kewajiban keluarga, bukan negara, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sebagian besar anggaran ke sektor produktif seperti industri dan infrastruktur.

Selain fondasi budaya, perkembangan sistem kesejahteraan Asia Timur juga dibentuk oleh logika rezim otoriter pembangunan yang mendominasi kawasan pada paruh kedua abad ke-20. Pemimpin seperti Park Chung-hee di Korea Selatan dan Lee Kuan Yew di Singapura adalah arsitek negara pembangunan (developmental state) yang menekankan modernisasi ekonomi cepat melalui industrialisasi berat, disiplin sosial, dan koordinasi ekonomi yang ketat antara negara dan sektor swasta. Dalam konteks ini, kebijakan sosial tidak didesain sebagai hak, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan strategis negara.

Kesejahteraan bersifat instrumental dalam tiga cara utama. Pertama, negara memobilisasi tabungan nasional melalui skema pensiun wajib, seperti *Central Provident Fund* (CPF) di Singapura. Sistem ini berfungsi ganda: memberikan perlindungan dasar bagi individu, sekaligus menyediakan modal pembangunan jangka panjang bagi negara untuk membiayai perumahan publik, infrastruktur, dan investasi industri (Abe, 2006). Kedua, kebijakan sosial digunakan untuk meredam keresahan buruh dan mencegah radikalisasi politik, terutama ancaman komunisme di Korea Selatan dan Taiwan selama Perang Dingin. Program perumahan pekerja, pendidikan teknis, dan perlindungan dasar digunakan untuk menciptakan stabilitas sosial yang penting bagi ekspor manufaktur. Ketiga, negara melakukan investasi masif dalam pendidikan sebagai strategi pembangunan manusia. Pendidikan, dalam pandangan rezim pembangunan, adalah mekanisme

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



paling efektif untuk meningkatkan produktivitas, menarik investasi asing, dan mempersiapkan tenaga kerja untuk industri berteknologi tinggi (Abe, 2006).

Pragmatisme ini menciptakan model kesejahteraan yang sangat berbeda dibandingkan Barat. Negara Asia Timur tidak menolak kesejahteraan, tetapi memprioritaskannya sesuai logika pembangunan: kesejahteraan harus mendukung pertumbuhan, bukan mendahuluinya. Hal ini menghasilkan pola kebijakan yang selektif, berbiaya rendah, tetapi sangat efektif dalam meningkatkan mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade.

Dengan demikian, model Asia Timur mencerminkan kombinasi unik antara nilai Konfusianisme dan strategi pembangunan negara. Keluarga berperan sebagai jaring pengaman utama, sementara negara menggunakan kebijakan sosial sebagai alat strategis untuk stabilitas, modernisasi, dan peningkatan modal manusia. Filosofi ini menjelaskan mengapa sistem kesejahteraan Asia Timur berkembang berbeda dari model universalis Skandinavia, meskipun sama-sama menanggapi tantangan sosial dan ekonomi modern.

Konfigurasi Institusional: Perbandingan Arsitektur Kesejahteraan

Perbedaan mendasar antara model kesejahteraan Skandinavia dan Asia Timur tidak hanya berasal dari akar filosofis, tetapi juga termanifestasi secara jelas dalam konfigurasi institusional yang mengatur bagaimana kebijakan sosial dirancang, didanai, dan diimplementasikan. Arsitektur kelembagaan ini mencerminkan prioritas dan nilai yang berbeda: Skandinavia menekankan solidaritas universal berbasis kewarganegaraan, sementara Asia Timur membangun sistem produktivis yang menempatkan pekerjaan dan kontribusi sebagai basis utama hak-hak sosial. Dengan demikian, setiap model menciptakan ekosistem kebijakan yang sangat berbeda dalam hal sumber pendanaan, penyedia layanan, dan mekanisme redistribusi. Perbedaan filosofis di atas bermanifestasi dalam desain kelembagaan yang sangat kontras. Tabel 1 merangkum perbedaan struktural utama antara kedua model.

Tabel 1 Perbandingan Konfigurasi Institusional Model Skandinavia dan Asia Timur

Dimensi	Model Skandinavia (Nordik)	Model Asia Timur (Produktivis)
Sumber Pendanaan Utama	Perpajakan umum (*General Taxation*) yang tinggi dan progresif.	Asuransi Sosial (*Social Insurance*) berbasis kontribusi & Tabungan Wajib (*Provident Fund*).
Basis Hak Kesejahteraan	Kewarganegaraan (*Citizenship*). Hak melekat pada individu sebagai warga negara.	Pekerjaan (*Employment*) & Kontribusi. Hak melekat pada status pekerja atau pembayar iuran.
Penyediaan Layanan	Monopoli atau dominasi Sektor Publik. Negara adalah penyedia sekaligus pendana.	Hibrida Publik-Swasta. Negara sebagai regulator/pendana, sektor swasta/nirlaba sebagai penyedia.
Fokus Kebijakan Keluarga	*Defamilialization*: Negara mengambil alih beban pengasuhan untuk mendukung partisipasi kerja perempuan.	*Familialism*: Keluarga (terutama perempuan) diharapkan menjadi penyedia kesejahteraan utama.
Tingkat Redistribusi	Tinggi. Transfer tunai dan layanan dirancang untuk meratakan hasil (*outcome*).	Rendah hingga Sedang. Fokus pada kesetaraan kesempatan (*opportunity*) melalui pendidikan.
Perlindungan Pasar Kerja	*Flexicurity*: Pasar kerja fleksibel tetapi jaminan pengangguran tinggi dan pelatihan aktif.	Keamanan Kerja Perusahaan (*Enterprise Welfare*) atau pasar kerja ganda (dualistik).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2025

Struktur Pendanaan: Pajak vs. Asuransi dan Tabungan

Salah satu elemen paling fundamental yang membedakan model kesejahteraan Skandinavia dan Asia Timur terletak pada arsitektur pendanaannya. Cara negara mengumpulkan sumber daya untuk mendanai layanan publik mencerminkan prioritas ideologis masing-masing model:

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



solidaritas universal di Skandinavia versus instrumentalisme pembangunan di Asia Timur. Struktur pendanaan ini tidak hanya menentukan kapasitas redistribusi negara, tetapi juga memengaruhi sejauh mana risiko sosial dibagi, siapa yang dianggap "layak" menerima manfaat, serta bagaimana beban kesejahteraan dialokasikan antara negara, pasar, dan keluarga.

Di negara-negara Skandinavia, sistem pendanaan berbasis pajak menjadi tulang punggung negara kesejahteraan. Dengan rasio pajak terhadap PDB yang umumnya berada pada kisaran 40–45%, wilayah ini termasuk yang tertinggi di dunia (Nordic Health & Welfare Statistics, 2024). Pajak progresif memungkinkan negara memaksimalkan *risk pooling*—yaitu pembagian risiko secara luas di seluruh populasi. Individu sehat membantu menanggung biaya kesehatan individu yang sakit, sementara kelompok kaya menyubsidi kelompok berpendapatan rendah. Prinsip dasar sistem ini adalah bahwa risiko sosial adalah tanggung jawab kolektif, dan negara berperan sebagai mekanisme solidaritas yang terorganisasi. Dengan demikian, pendanaan melalui pajak bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi manifestasi politik dari komitmen terhadap kesetaraan dan jaminan universal.

Sebaliknya, negara-negara Asia Timur cenderung menghindari model berbasis pajak yang besar—baik karena pertimbangan ideologis, keterbatasan kapasitas fiskal historis, maupun strategi pembangunan yang menekankan efisiensi ekonomi. Dua mekanisme utama mendominasi sistem pendanaan di kawasan ini: *asuransi sosial* berbasis kontribusi dan *provident funds* berbasis tabungan wajib.

Pertama, sistem **asuransi sosial** di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mengandalkan premi yang dibayarkan bersama oleh pekerja dan majikan. Negara memang memberikan subsidi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, tetapi prinsip dasarnya adalah *employment-based entitlement*: mereka yang bekerja berhak atas perlindungan. Hal ini mencerminkan logika produktivis yang menempatkan partisipasi ekonomi sebagai syarat utama akses terhadap kesejahteraan (Wong, 2025). Model ini memperkuat keterikatan antara pasar kerja dan hak sosial, sekaligus menciptakan kesenjangan antara pekerja formal dan informal. Karena kontribusi menjadi dasar hak, mereka yang bekerja di sektor informal—pedagang kecil, pekerja lepas, atau perempuan dengan karir terputus—sering kali mendapatkan perlindungan yang lebih lemah.

Kedua, skema **provident fund** seperti *Central Provident Fund* (CPF) di Singapura merepresentasikan bentuk pendanaan paling ekstrem dalam model produktivis Asia Timur. Tidak seperti asuransi sosial yang mengandalkan mekanisme solidaritas antar peserta, CPF merupakan tabungan wajib yang sangat individualistik. Setiap pekerja memiliki akun tersendiri, dan manfaat yang diterima sepenuhnya bergantung pada berapa banyak ia telah menabung serta imbal hasil investasinya (Asher dkk., 2014). Secara makro, model ini memiliki dua keuntungan besar: pertama, ia mendorong tingkat tabungan nasional yang sangat tinggi; kedua, negara memperoleh pasokan modal domestik yang stabil untuk mendanai investasi jangka panjang seperti perumahan dan infrastruktur. Namun, dari perspektif perlindungan sosial, model ini memiliki kelemahan signifikan. Tanpa mekanisme *risk pooling*, individu berpenghasilan rendah, pekerja dengan karier tidak stabil, atau mereka yang mengalami penyakit kronis cenderung menghadapi risiko ketidakmampuan finansial di masa tua. Dengan kata lain, pendekatan ini sangat efisien untuk pembangunan, tetapi relatif lemah dalam menciptakan jaring pengaman universal.

Perbedaan radikal antara pajak progresif Nordik dan skema kontribusi atau tabungan wajib Asia Timur mencerminkan dua filosofi yang bertolak belakang: satu berorientasi pada solidaritas universal, dan lainnya pada tanggung jawab individual dalam kerangka pembangunan ekonomi. Struktur pendanaan ini menjadi fondasi yang membentuk seluruh arsitektur kesejahteraan di masing-masing kawasan.

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penyediaan Layanan: Negara vs. Pasar

Perbedaan mencolok antara model kesejahteraan Skandinavia dan Asia Timur tidak hanya tampak pada struktur pendanaan, tetapi juga pada bagaimana layanan publik—terutama kesehatan, pendidikan, perawatan anak, dan layanan sosial—disediakan. Kedua kawasan ini mengadopsi arsitektur penyediaan layanan yang sangat berbeda, mencerminkan orientasi ideologis masing-masing: Skandinavia menempatkan negara sebagai penyedia utama layanan kesejahteraan, sementara Asia Timur lebih mengandalkan pasar dan aktor non-pemerintah sebagai mitra strategis. Model penyediaan ini pada akhirnya membentuk kualitas, aksesibilitas, dan tingkat kesetaraan dalam layanan sosial.

Dalam model Skandinavia, negara menjalankan peran dominan sebagai penyedia layanan publik. Pemerintah—baik nasional maupun lokal—adalah pemberi kerja terbesar, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Mayoritas dokter, perawat, guru, dan pengasuh anak bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai badan publik. Konfigurasi ini memungkinkan standarisasi kualitas yang ketat dan relatif seragam di seluruh wilayah geografis. Di Swedia, misalnya, pemerintah daerah (*municipalities*) secara hukum bertanggung jawab atas layanan kesehatan primer, pendidikan dasar, dan perawatan lansia, dan diberi otonomi luas untuk mengatur pembiayaan serta manajemen layanan tersebut (Fred, 2025). Dengan struktur terdesentralisasi ini, negara dapat menjaga kohesi sosial melalui standar layanan yang tinggi dan akses universal, sekaligus menyesuaikan implementasi dengan kebutuhan lokal.

Pendekatan "negara sebagai penyedia langsung" juga didukung oleh budaya politik yang menekankan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Karena layanan publik ditujukan untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi status ekonomi, kelas menengah pun sangat mengandalkan layanan publik, yang pada gilirannya menciptakan basis politik yang kuat untuk mempertahankan pendanaan publik yang besar. Universalisme layanan ini tidak hanya menyediakan perlindungan sosial, tetapi juga menanamkan rasa kesetaraan dan solidaritas.

Sebaliknya, negara-negara Asia Timur mengadopsi pola yang jauh lebih hibrida dan berorientasi pasar dalam penyediaan layanan sosial. Di banyak negara kawasan, pemerintah berperan sebagai regulator dan pendana, tetapi bukan sebagai penyedia layanan utama. Korea Selatan merupakan contoh paling jelas dari dominasi penyedia swasta dalam layanan kesehatan: lebih dari 90% rumah sakit dimiliki oleh sektor swasta, sementara pemerintah menjalankan skema asuransi kesehatan nasional tunggal (*National Health Insurance*). Walaupun pembayarannya dikelola oleh negara, penyedia layanan sebagian besar berada di tangan aktor pasar, sehingga menciptakan kombinasi antara akses universal dan kompetisi layanan (Chang, 2004).

Singapura menampilkan model yang berbeda tetapi tetap berorientasi pasar. Rumah sakit pemerintah direstrukturisasi menjadi entitas korporat publik—secara formal dimiliki negara tetapi beroperasi dengan prinsip bisnis, termasuk target efisiensi, mekanisme kompetisi, dan struktur biaya yang transparan. Pasien diwajibkan membayar *co-payment* untuk setiap penggunaan layanan, sebagai bagian dari upaya mencegah konsumsi berlebih dan memastikan keberlanjutan fiskal. Praktek ini mencerminkan filosofi produktivis yang menekankan tanggung jawab individu dan insentif ekonomi bahkan dalam konteks layanan dasar (Chang, 2004).

Rezim penyediaan layanan Asia Timur juga sangat dipengaruhi oleh norma Konfusianisme dan logika pembangunan. Keluarga, bukan negara, dianggap sebagai penyedia utama kesejahteraan, sehingga layanan seperti perawatan lansia atau pengasuhan anak sering kali diurus oleh keluarga atau penyedia swasta kecil. Negara baru turun tangan apabila kapasitas keluarga terbukti tidak memadai.

Meskipun model berbasis pasar dapat mendorong inovasi dan efisiensi, ia juga menimbulkan tantangan serius dalam hal kesetaraan akses. Biaya layanan yang lebih tinggi sering kali menjadi penghalang bagi kelompok berpenghasilan rendah, sementara kompetisi pasar dapat

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menghasilkan variasi kualitas yang signifikan. Ini berbeda dengan model Skandinavia yang memprioritaskan pemerataan layanan melalui penyediaan publik langsung.

Pada akhirnya, perbedaan dalam penyediaan layanan ini mengilustrasikan bagaimana dua wilayah tersebut menafsirkan tujuan negara kesejahteraan: sebagai mekanisme solidaritas universal (Skandinavia) atau sebagai alat penunjang pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan efisiensi dan tanggung jawab individu (Asia Timur).

PEMBAHASAN

Pensiun: Solidaritas vs. Akumulasi Aset (Kasus Swedia vs. Singapura)

Perbandingan sistem pensiun memberikan ilustrasi teknis yang paling jelas tentang perbedaan filosofi kedua model.

Swedia: Notional Defined Contribution (NDC)

Setelah reformasi besar-besaran di akhir 1990-an, Swedia beralih dari sistem *Defined Benefit* tradisional ke sistem *Notional Defined Contribution* (NDC).

1) Mekanisme: Secara teknis, ini adalah sistem *Pay-As-You-Go* (kontribusi pekerja saat ini membiayai pensiunan saat ini). Namun, setiap pekerja memiliki "akun nosional" (virtual) yang mencatat kontribusi seumur hidup mereka.
2) Logika: Pensiun yang diterima dihitung berdasarkan total kontribusi seumur hidup dibagi estimasi sisa umur saat pensiun. Ini menciptakan insentif kerja yang kuat (bekerja lebih lama = pensiun lebih besar).
3) Solidaritas: Meskipun meniru logika asuransi swasta, sistem ini tetap mempertahankan "Pensiun Garansi" (*Guarantee Pension*) yang didanai pajak bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak pernah bekerja, memastikan tidak ada lansia yang jatuh miskin. Ini adalah kompromi khas Nordik antara efisiensi pasar dan perlindungan sosial (European Commission, 2021).

Singapura: Central Provident Fund (CPF)

Singapura menggunakan sistem *Fully Funded* berbasis *Defined Contribution*.

1) Mekanisme: Pekerja dan majikan menyetor persentase gaji (sangat tinggi, bisa mencapai 37% total) ke akun individu di CPF. Dana ini dibagi ke tiga akun: Akun Biasa (perumahan/pendidikan), Akun Khusus (pensiun), dan Akun Medis.
2) Logika: Negara tidak menanggung kewajiban pensiun masa depan (liabilitas fiskal nol). Individu bertanggung jawab penuh atas masa tua mereka. Dana CPF juga digunakan secara agresif untuk membiayai kepemilikan rumah publik (HDB), menjadikan kesejahteraan berbasis aset (*asset-based welfare*).
3) Kritik & Reformasi: Kelemahan sistem ini adalah risiko ketidakcukupan dana bagi pekerja bergaji rendah atau mereka yang hidup lebih lama dari tabungan mereka. Menyadari hal ini, Singapura baru-baru ini memperkenalkan Silver Support Scheme, sebuah skema bantuan tunai triwulanan bagi lansia miskin yang didanai anggaran negara—sebuah penyimpangan signifikan dari ortodoksi produktivis murni menuju elemen redistributif, meskipun tetap diuji kekayaannya (*means-tested*) (Tan, 2023).

Kesehatan: Universalisme Pajak vs. Asuransi Inklusif (Kasus Norway vs. Korea Selatan)

Norwegia: Layanan Kesehatan Berbasis Pajak

Norwegia merepresentasikan model Beveridge murni (seperti NHS Inggris) namun dengan pendanaan yang jauh lebih besar berkat kekayaan minyak.

1) Struktur: Didanai pajak, dikelola negara. Hampir gratis di titik layanan (dengan batas *out-of-pocket* tahunan yang rendah).

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2) Keunggulan/Kelemahan: Mencapai ekuitas yang sangat tinggi; status sosial ekonomi hampir tidak mempengaruhi akses. Namun, biaya sistem ini sangat mahal (sekitar 10-11% PDB) dan menghadapi tantangan waktu tunggu untuk prosedur elektif (Saunes dkk, 2024).

Korea Selatan: Dari Fragmentasi ke Moon Care

Korea Selatan menggunakan model Asuransi Kesehatan Nasional (NHI), mirip dengan Jerman atau Jepang.

1) Evolusi: Awalnya terfragmentasi dalam ratusan serikat asuransi kecil dengan manfaat berbeda-beda (sangat stratifikasi). Setelah reformasi tahun 2000, semua digabung menjadi pembayar tunggal (*Single Payer*) NHI, meningkatkan ekuitas secara drastis (Lee dkk, 2021).
2) Moon Care (2017): Di bawah Presiden Moon Jae-in, Korea meluncurkan reformasi ambisius yang dikenal sebagai "Moon Care". Tujuannya adalah memperluas cakupan asuransi ke layanan yang sebelumnya tidak ditanggung (seperti MRI, USG, dan perawatan kanker mahal) dan menetapkan batas atas biaya medis sendiri. Kebijakan ini secara eksplisit bertujuan memutus logika "uang menentukan akses" dan merupakan langkah besar Korea menjauh dari model produktivis minimalis menuju model kesejahteraan inklusif yang lebih komprehensif (Sohn, 2021).

Pendidikan: Kesetaraan vs. Modal Manusia

Pendidikan adalah sektor dimana kedua model tampak serupa dalam hal prioritas tinggi, tetapi sangat berbeda dalam filosofi.

1) Model Nordik (Finlandia): Pendidikan dipandang sebagai alat untuk kesetaraan sosial. Sistem pendidikan Finlandia dirancang untuk meminimalkan perbedaan prestasi antar sekolah. Tidak ada sekolah swasta berbayar, tidak ada ujian standar nasional (kecuali di akhir SMA), dan guru memiliki otonomi profesional tinggi. Fokusnya adalah memastikan siswa yang paling lemah pun tidak tertinggal ("*No child left behind*" dalam arti sebenarnya). Kepercayaan (*trust*) adalah mata uang utama sistem ini (Lee, 2010).
2) Model Asia Timur: Pendidikan dipandang sebagai alat pembentukan modal manusia dan mobilitas sosial kompetitif. Sistem di Korea, Taiwan, dan Singapura sangat berorientasi pada ujian (*exam-oriented*). Negara berinvestasi besar-besaran, tetapi keluarga juga mengeluarkan biaya fantastis untuk "pendidikan bayangan" (les privat/hagwon) demi keunggulan kompetitif anak. Meskipun menghasilkan skor PISA tertinggi di dunia, sistem ini sering dikritik karena menciptakan stres tinggi, ketimpangan akses berdasarkan kekayaan orang tua, dan menghambat kreativitas (Abe, 2006).

Kebijakan Keluarga dan Krisis Demografi

Ini adalah area di mana perbedaan kedua model paling berdampak pada masa depan bangsa.

1) Skandinavia: Menerapkan kebijakan defamilialisasi. Negara menyediakan penitipan anak (*daycare*) universal yang murah dan cuti orang tua (*parental leave*) yang murah hati yang dibagi antara ayah dan ibu (kuota ayah). Ini memungkinkan perempuan bekerja penuh waktu sambil memiliki anak. Hasilnya, tingkat kelahiran di Nordik (meskipun menurun) masih jauh lebih tinggi daripada di Asia Timur, dan partisipasi kerja perempuan sangat tinggi (Choi, 2007).
2) Asia Timur: Terlambat merespons perubahan struktur keluarga. Selama berdekade-dekade, negara mengandalkan istri/ibu untuk mengurus anak dan lansia tanpa dukungan negara. Ketika perempuan semakin terdidik dan masuk pasar kerja, mereka menghadapi "beban ganda". Tanpa dukungan negara yang memadai, perempuan Asia Timur melakukan "pemogokan melahirkan" (*birth strike*). Akibatnya, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura kini memiliki tingkat fertilitas terendah di dunia (di bawah 1.0), menciptakan krisis

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



eksistensial bagi keberlanjutan ekonomi dan sistem kesejahteraan mereka (Chou dkk, 2024).

Dinamika Perubahan: Konvergensi dan Hibriditas Baru

Tulisan ini menyoroti bahwa dikotomi kaku "Barat vs. Timur" semakin kabur. Terjadi proses konvergensi asimetris yang didorong oleh tekanan global dan domestik yang serupa namun direspon dengan kapasitas berbeda.

Pergeseran Asia Timur: Menuju Pasca-Produktivis?

Banyak sarjana berpendapat bahwa label "produktivis" murni tidak lagi sepenuhnya akurat untuk menggambarkan Asia Timur kontemporer. Sejak akhir 1990-an, terjadi ekspansi kesejahteraan yang luar biasa di kawasan ini, yang didorong oleh dua faktor utama:

1) **Demokratisasi:** Di Korea Selatan dan Taiwan, persaingan politik memaksa partai-partai untuk menawarkan program kesejahteraan guna menarik pemilih. Kesejahteraan tidak lagi hanya alat legitimasi otoriter, tetapi hak yang dituntut secara demokratis. Ekspansi tunjangan pensiun dasar dan asuransi kesehatan di kedua negara ini berkorelasi langsung dengan siklus pemilu (Kwon, 2007).
2) Risiko Sosial Baru: Deindustrialisasi dan pasar kerja yang semakin tidak stabil (munculnya pekerja prekariat/gig economy) membuat model kesejahteraan berbasis perusahaan (*company welfare*) tidak lagi memadai. Negara terpaksa memperkuat jaring pengaman sosial publik. Pengenalan Asuransi Perawatan Jangka Panjang (*Long-Term Care Insurance*) di Jepang dan Korea adalah contoh negara mengambil alih tanggung jawab yang dulunya domain sakral keluarga (Chou dkk, 2024).

Sarjana seperti Choi (2012) dan Yang (2017) menyebut fase ini sebagai transisi menuju **Negara Kesejahteraan Inklusif** atau bahkan hibrida yang mendekati model Eropa Kontinental, meskipun warisan produktivis (penekanan pada etos kerja) masih kuat (Yang & Kühner, 2020).

Adaptasi Skandinavia: Aktivasi dan Efisiensi

Di sisi lain, negara-negara Skandinavia tidak statis. Menghadapi tekanan biaya penuaan penduduk dan persaingan ekonomi global, mereka melakukan penyesuaian yang sering disebut sebagai *Recalibration*.

1) **Kebijakan Aktivasi:** Terdapat pergeseran dari sekadar perlindungan pendapatan pasif menuju kebijakan "aktif" (*Active Labor Market Policies*). Syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran diperketat, dan penerima diwajibkan mengikuti pelatihan atau pencarian kerja. Ini adalah elemen "produktivis" yang diadopsi ke dalam model sosial demokrat (Fleckenstein dkk, 2019).
2) **Pasar dalam Negara:** Swedia telah menjadi pionir dalam mengizinkan penyedia swasta (termasuk perusahaan profit) untuk mengelola sekolah dan panti jompo yang didanai publik. Ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan pilihan, meskipun memicu debat panas mengenai kualitas dan segregasi sosial (Fred, 2025).

Peran Krisis Global

Krisis besar berfungsi sebagai katalis perubahan bagi kedua model.

1) **Krisis Asia 1997:** Menghancurkan mitos pertumbuhan dengan pemerataan di Asia Timur dan memaksa pembangunan jaring pengaman sosial formal pertama di Korea dan Taiwan (seperti asuransi pengangguran) (Kwon, 2007).
2) **Krisis Finansial 2008 & COVID-19:** Menunjukkan ketahanan model Nordik sebagai stabilisator otomatis. Pandemi COVID-19 di Asia Timur memicu intervensi negara yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk bantuan tunai langsung universal di beberapa

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



negara (seperti Jepang dan Singapura), yang melanggar tabu lama terhadap pemberian cuma-Cuma (Lee & Hwang, 2022).

Dari analisis di atas, terlihat bahwa kedua model sedang bergerak menuju titik tengah, meskipun dari arah yang berlawanan. Asia Timur sedang membangun negara kesejahteraan (*welfare state building*) untuk mengatasi kegagalan pasar dan keluarga, sementara Skandinavia sedang merestrukturisasi negara kesejahteraan (*welfare state restructuring*) untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Namun, perbedaan mendasar kemungkinan akan tetap ada. Asia Timur tampaknya tidak akan mengadopsi tingkat perpajakan tinggi ala Nordik. Resistensi politik dan struktur ekonomi yang berorientasi ekspor membuat kenaikan pajak penghasilan menjadi sulit. Sebaliknya, mereka akan terus mengandalkan bauran asuransi sosial, tabungan wajib, dan pajak konsumsi (PPN) (Chang, 2004).

Selain itu, tantangan imigrasi menjadi titik divergensi baru. Negara-negara Nordik berjuang mengintegrasikan populasi imigran besar ke dalam sistem kesejahteraan universal mereka, yang memicu ketegangan politik nativis. Sebaliknya, Asia Timur (terutama Jepang dan Korea) masih sangat resisten terhadap imigrasi skala besar sebagai solusi demografi, lebih memilih otomatisasi/robotik dan kebijakan pro-natalis yang sejauh ini belum berhasil (Mizuno, 2014).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

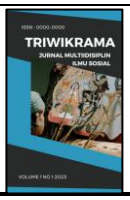
Studi literatur ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara model *Welfare State* Skandinavia dan *Productive Welfare* Asia Timur melampaui sekadar variasi anggaran; ini adalah perbedaan paradigma tentang hakikat kontrak sosial.

1) Filosofi: Skandinavia memandang kesejahteraan sebagai hak untuk dekomodifikasi dan kesetaraan. Asia Timur memandangnya sebagai investasi untuk produktivitas dan pembangunan bangsa.
2) Institusi: Skandinavia mengandalkan sektor publik yang dominan dan pajak tinggi. Asia Timur mengandalkan kemitraan publik-swasta, asuransi sosial, dan peran keluarga yang (dulunya) kuat.
3) Dinamika: Kedua model menunjukkan ketahanan (*resilience*) dan kemampuan adaptasi. Asia Timur secara agresif memperluas inklusivitas sosial (meninggalkan produktivisme ortodoks) sebagai respons terhadap demokrasi dan demografi. Skandinavia mengadopsi efisiensi pasar untuk menyelamatkan solidaritas universal.

Pada akhirnya, label produktivis untuk Asia Timur mungkin semakin usang, digantikan oleh realitas negara kesejahteraan hibrida yang kompleks. Bagi negara-negara berkembang lainnya, pelajaran dari perbandingan ini sangat berharga: pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat kesejahteraan (pelajaran Asia Timur), tetapi tanpa institusi redistribusi yang kuat dan inklusif (pelajaran Skandinavia), pertumbuhan tersebut rentan terhadap ketimpangan yang memecah belah masyarakat dan krisis demografi yang melumpuhkan masa depan.

Saran

a. Disarankan untuk mengadopsi kebijakan *parental leave* yang setara gender dan penyediaan *daycare* publik yang terjangkau ala Nordik untuk menjaga tingkat fertilitas dan partisipasi kerja perempuan.
b. Para peneliti disarankan untuk meninjau kembali relevansi label "Rezim Kesejahteraan Produktivis" bagi Asia Timur. Bukti menunjukkan bahwa reformasi terbaru, seperti *Moon Care* di Korea Selatan dan ekspansi jaminan sosial pasca-COVID-19, menandakan pergeseran



paradigma menuju inklusivitas yang lebih luas, sehingga kerangka teoritis lama mungkin perlu direvisi.

c. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak jangka panjang dari konvergensi kebijakan ini. Khususnya, bagaimana efektivitas negara-negara Nordik dalam mempertahankan prinsip universalisme di tengah masuknya elemen pasar (privatisasi layanan), dan bagaimana negara Asia Timur menjaga daya saing ekonomi saat beban pengeluaran sosial mereka meningkat drastis akibat penuaan penduduk.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abe, M. (2006). The developmental state and educational advance in East Asia. *Educate~*, *6*(1), 6-12. https://www.researchgate.net/publication/26598087_The_Developmental_State_and_Educational_Advance_in_East_Asia

Asher, M. G., & Bali, A. S. (2014). Singapore's pension system: Challenges and reform options. *Equitable and Sustainable Pensions: Challenges and Experience*, 239-253. https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781616359508/ch012.xml

Chang, H. J. (2004). The role of social policy in economic development: Some theoretical reflections and lessons from East Asia. In *Social policy in a development context* (pp. 246-261). London: Palgrave Macmillan UK. https://www.yunbaogao.cn/index/partFile/5/unrisd/2022-03/5_21444.pdf

Choi, Y. J. (2007). *Coming to a standstill? A new theoretical idea of East Asian welfare regimes* (Barnett Paper in Social Research No. 2007/3). Department of Social Policy and Social Work, University of Oxford. https://www.spi.ox.ac.uk/files/barnettpaper20073yjcpdf

Chou, Y.-C., Mathew Puthenparambil, J., Kröger, T., & Pu, C. (2024). *Multidimensional care poverty among East Asian and Nordic older adults*. *Innovation in Aging, 8*(9), igae076. https://doi.org/10.1093/geroni/igae076

Engelstad, F., Larsen, H., & Rogstad, J. (2017). The public sphere in the Nordic model. *Institutional change in the public sphere: Views on the Nordic model*. https://www.researchgate.net/publication/318230060_The_Public_Sphere_in_the_Nordic_Model

European Commission. (2021). *The Swedish pension system and pension projections until 2070*. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2021-05/se_-_ar_2021_final_pension_fiche.pdf

Fleckenstein, T., & Lee, S. C. (2019). *Roads and barriers towards social investments: Comparing labour market and family policy reforms in Europe and East Asia*. *Policy & Society, 39*(2), 266–283. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1688617

Fred, M. (2025). *Social investments in Swedish municipalities – The rise and fall of a reform*. Department of Political Science, Lund University. https://www.svet.lu.se/en/article/social-investments-swedish-municipalities-rise-and-fall-reform

Holliday, I. (2000). *Productivist welfare capitalism: Social policy in East Asia*. *Political Studies, 48*(4), 706–723. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00279

Korean Culture and Information Service. (2021). *Inclusive "Moon Jae-in Care"*. https://www.korean-culture.org/eng/webzine/202110/sub09.html

*Corresponding author
E-mail addresses: racheltambunan21@gmail.com



Kwon, H.-j. (2007). *Transforming the developmental welfare states in East Asia* (DESA Working Paper No. 40). United Nations, Department of Economic and Social Affairs. https://desapublications.un.org/file/140/download

Lee, S., & Hwang, I. (2022). COVID-19 and welfare state trajectory in South Korea: Stagnation, consolidation, or transformation? *Asia & the Pacific Policy Studies, 9*(1), 81–96. https://doi.org/10.1111/

Lee, T.-J., Hwang, I., & Kim, H.-L. (2021). Equity of health care financing in South Korea: 1990–2016. *BMC Health Services Research, 21*, Article 1327. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07308-0

Lee, Y. (2010). *Views on education and achievement: Finland's story of success and South Korea's story of decline. KEDI Journal of Educational Policy, 7*(2), 379–401. https://doi.org/10.22804/kjep.2010.7.2.009

Mizuno, M. (2014). *Beyond European welfare regimes: Comparative perspectives on East Asian welfare systems. Journal of Social Policy, 43*(4), 711–730. https://doi.org/10.1017/S0047279414000258

Nordic Cooperation. (2021). *Social policy and welfare*. https://www.norden.org/en/information/social-policy-and-welfare

Nordic Health & Welfare Statistics. (2024). *About the Nordic welfare model*. https://nhwstat.org/welfare/about-nordic-welfare-model-0

Nordics. (2020). *The Nordic Model*. Nordics.info. https://nordics.info/themes/the-nordic-model

Palme, O. (1984). *Employment and welfare*. Harvard Trade Union Program. Retrieved November 22, 2025, from https://htup.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2023/08/1984palm.pdf

Saunes, I. S., Durvy, B., & Litvinova, Y. (2024). *Norway: health system summary* (Health System Summary 2024). European Observatory on Health Systems and Policies, World Health Organization. Retrieved November 22, 2025, from https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/norway-health-system-summary-2024

Sohn, J.-a. (2021). *Inclusive 'Moon Jae-in Care'*. Korean Culture and Information Service. Retrieved November 22, 2025, from https://www.korean-culture.org/eng/webzine/202110/sub09.html

Stroup, A. (2022). *The more universal the welfare state, the freer the people. Jacobin*. https://jacobin.com/2022/04/esping-andersen-welfare-state-social-democracy-benefits

Tan, X. (2023). *Successful aging in Singapore* (Graduate research paper). Cornell University Graduate School. Retrieved November 22, 2025, from https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/111302/Xiao%20Tan%20Research%20Paper_FINAL_Combined.pdf?sequence=3

Wong, J. (2025). *The welfare state in East Asia*. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/elements/welfare-state-in-east-asia/77974EF90B543C2A1D67EE52C02FCB26

Yang, N., & Kühner, S. (2020). *Beyond the limits of the productivist regime: Capturing three decades of East Asian welfare development with fuzzy sets. Social Policy and Society, 19*(4), 613–627. https://doi.org/10.1017/S147474641900054X

Zhou, J., & Ronald, R. (2016). *Housing and welfare regimes: Examining the changing role of public housing in China. Housing, Theory and Society, 34*(3), 253–276. https://doi.org/10.1080/14036096.2016.1223165